



**SUMBER BERITA**

**MINGGU, 22 SEPTEMBER 2019**

<input checked="" type="checkbox"/>	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU	.....

**KATEGORI BERITA UNTUK BPK**

POSITIF     NETRAL     BAHAN PEMERISAAN     PERHATIAN KHUSUS

**Usai Ukur Ulang, Kejari Ekspos Kerugian Negara**

**Dugaan Penjualan Lahan Hibah Pemkot**

**BENGKULU** - Penyidik Pidsus Kejaksaan Negeri (Kejari) Bengkulu terus menggeber dugaan menjual lahan hibah milik Pemerintah Kota (Pemkot) Bengkulu. Sejumlah saksi penting sudah diperiksa yaitu tim pembebasan yakni tim 9 yang mana tim ini membebaskan lahan seluas lebih kurang 62,9 hektare.

Rencananya, penyidik Pidsus Kejari akan melakukan pengukuran ulang yang akan dilaksanakan pada Selasa (24/9) mendatang. Pengukuran ulang itu nantinya akan menggunakan dokumen salinan peta bidang yang

dibuat tahun 1995 silam.

Kepala Kejari Bengkulu, Emilwan Ridwan, SH, MH mengatakan bahwa pengukuran ulang lahan tersebut akan dijadwalkan hari Selasa (24/9) dengan melibatkan pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Bengkulu. Tujuannya untuk memastikan apakah lahan yang hibah yang dijual itu sesuai dengan peta bidang yang diterbitkan tahun 1995 itu. Saat ini penyidik memang hanya memegang salinannya saja namun Kepala BPN Kota Bengkulu saat itu Ibnu Wardono mengakui bahwa salinan tersebut asli karena ada tanda tangan yang bersangkutan dan benar produk dari BPN Kota Bengkulu pada tahun 1995.

Ditambahkan Kajari, pihaknya sudah berkordinasi pihak terkait mulai dari pihak kelurahan, RT dan RW untuk secara bersama-sama dengan tim BPN Kota dan penyidik melakukan pengukuran lahan mulai dari titik nolnya. "Ya kita Selasa nanti melakukan pengukuran ulang, kita akan berpedoman dengan salinan peta bidang yang diakui keasliannya oleh kepala BPN pada saat itu," ujarnya.

Ia menambahkan, pengukuran tersebut berguna untuk mengetahui berapa lahan yang diduga dijual oleh oknum masyarakat dan berapa lahan yang digunakan sesuai peruntukannya saat dibebaskan tahun 1995 lalu. Untuk diketahui, pembebasan lahan tersebut awalnya bertujuan untuk dibangun perumahan ASN Pemkot Bengkulu.

Adapun jumlah rumah yang dibangun sekitar 610 unit namun dikarenakan gempa ada beberapa rumah rusak sehingga tersisa 569 unit saja yang ditempati.

Rumah untuk ASN tersebut dibangun di atas lahan seluas 12 hektar. Dilanjutkan Kajari, untuk pemeriksaan sejumlah saksi untuk sementara sudah cukup dan pihaknya tinggal melakukan pengukuran ulang lahan serta nantinya menunggu hasil ekspose kerugian negara oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Bengkulu.

"Rencananya itu setelah hari Selasa kita melakukan pengukuran ulang, pada Rabu nanti akan ada ekspose terkait kerugian negara di BPKP," tutupnya. (cup)